

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang menyebabkan perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil, tak terkecuali negara Indonesia dan provinsi-provinsinya. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter tertinggi di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan perekonomian dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sebagaimana tujuan Bank Indonesia yang tercantum dalam UU RI No.3 Tahun 2004 Pasal 7, dijelaskan bahwasannya tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Di Indonesia kestabilan nilai rupiah dapat dilihat dari kestabilan nilai harga barang dan jasa. Jika harga barang-barang dan jasa mengalami peningkatan secara terus menerus maka dapat dikatakan bahwasannya nilai rupiah sedang tidak stabil, dan perekonomian sedang terkena penyakit inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat diartikan dengan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat dari adanya tidak kelancaran distribusi barang. Inflasi adalah

kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus di suatu wilayah pada periode tertentu. (Boediono 2011)

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bank Indonesia Official Website, "Pentingnya Kestabilan Inflasi). Sehingga inflasi harus dikendalikan agar tetap stabil, karena inflasi yang tidak stabil mempunyai dampak negatif bagi perekonomian suatu negara dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak dari ketidak stabilan inflasi yaitu ketika inflasi tinggi akan menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi menurun, sehingga standar hidup masyarakat ikut mengalami penurunan dan akhirnya semua orang terutama orang miskin menjadi semakin miskin. Oleh karenanya agar inflasi dapat terkendalikan, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah kebijakan moneter.

Sebelum tahun 2005 Bank Indonesia menggunakan pendekatan uang primer (base money) sebagai sasaran operasionalnya. Akan tetapi karena base money dianggap memiliki kelemahan seperti uang primer yang susah dikendalikan dengan base money, sejak Juli 2005 Bank Indonesia melakukan perubahan regime kebijakan moneter, dari pendekatan base money menjadi pendekatan Inflation Targeting Framework (ITF) ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Kinerja Inflation Targeting Framework dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 1.1**

Tabel Perbandingan Target Inflasi dan Aktual Inflasi di Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Target Inflasi</b>	<b>Inflasi Aktual (% , yoy)</b>
2008	5 +1%	11,06
2009	4,5 +1%	2,78
2010	5+1%	6,96
2011	5+1%	3,79
2012	4.5+1%	4,30
2013	4.5+1%	8,38
2014*	4.5+1%	8,36

Sumber: Laporan Bank Indonesia

Dari tabel diatas kita dapat melihat pada tahun 2008 inflasi yang terjadi tidak sesuai dengan inflasi yang diterangkan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2008 inflasi yang terjadi di Indonesia mencapai 11,06%,inflasi ini jika digolongkan menurut derajatnya termasuk inflasi ringan, akan tetapi membuat harga- harga barang dan jasa di Indonesia mengalami peningkatan, inflasi yang terjadi dikarenakan meningkatnya harga minyak dunia yang memaksa Pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008.

Selain itu inflasi juga disebabkan meningkatnya harga komoditas pangan dunia pada akhir tahun 2007 yang mengakibatkan meningkatnya biaya produksi perusahaan, sehingga harga makanan melambung tinggi. Pada tahun 2009 inflasi yang terjadi sesuai dengan target Bank Indonesia. Tahun 2010 angka inflasi berada diatas angka yang telah ditargetkan oleh Bank Indonesia, angka inflasi mencapai 6,96. Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan, inflasi yang terjadi di tahun 2010 disebabkan karena administered price dan volatile food yang berfluktuasi 2 tahun berikutnya

tahun 2011 dan tahun 2012, angka inflasi sudah mulai normal kembali sesuai dengan target yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Tahun 2013 dan tahun 2014, inflasi yang terjadi diatas angka yang yang telah ditargetkan BI. Tahun 2013, inflasi yang terjadi sebesar 8,38%, dari data BPS ini merupakan inflasi yang paling tinggi sejak 5 tahun terkahir setelah adanya krisis ekonomi global pada tahun 2008. Menurut Anwar Nasution, Guru Besar Ekonomi UI, hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga BBM pada tahun 2013 dan akibat dari melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Dari tahun 2013 ke tahun 2014, inflasi mengalami penurunan sebesar 0,02%. Inflasi tahun 2014 mencapai angka 8,36, sesuai dengan laporan BI pada detik finance, melejitnya inflasi ini disebabkan karena adanya bencana alam dan banjir yang melanda beberapa kota di Indonesia sejak awal tahun yang membuat harga pangan menjadi naik drastis, selain itu penyebab inflasi pada tahun 2014 adalah semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan adanya kenaikan harga elpiji 12kg oleh PT Pertamina Perseo pada 1 Januari 2014 ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Dari tabel dan uraian diatas, dapat dilihat bahwasannya inflasi yang terjadi tidak sesuai dengan inflasi yang ditargetkan. Itu artinya sistem Inflation Targeting Framework atau ITF belum mampu memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karenanya penting untuk mempelajari tentang

perilaku atau dinamika inflasi yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan moneter yang akan diterapkan.

Banyak studi yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan inflasi, akan tetapi sedikit sekali orang yang melakukan studi tentang upaya mengenali dinamika inflasi, terutama mengenai persistensinya. Persistensi merupakan suatu kondisi dimana suatu variabel akan cenderung menjauh dari nilai alaminya untuk waktu yang cukup lama, jika mengalami guncangan (Fuhrer, 1995). Persistensi inflasi adalah kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat ekuilibriumnya setelah timbulnya suatu shock (Marques, 2005). Sifat yang persisten dimiliki oleh inflasi, dimana derajat persistensi yang semakin tinggi sehingga akan menyebabkan sebuah perekonomian akan mengalami gangguan.

Persistensi dikatakan positif jika persistensi berada di atas nilai alamiahnya, sedangkan persistensi dikatakan negatif jika berada di bawah nilai alamiahnya. Pada umumnya persistensi inflasi meneliti tentang cepat lambatnya inflasi untuk kembali kepada titik alamiahnya (Fatimah Hidayati, 2013). Adanya shocks dalam perekonomian dapat menyebabkan terjadinya perubahan perilaku inflasi. Shocks (guncangan) ini pada awalnya akan mempengaruhi perilaku pembentukan harga sampai akhirnya akan mempengaruhi perilaku inflasi. Sifat guncangan ini adalah persisten yang dapat dikatakan pada waktu yang tidak singkat. Oleh



dipengaruhi shocks (gunjangan) yang termasuk di dalamnya adalah inflasi volatile food yaitu inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti adanya gangguan alam, gagal panen, dan inflasi administered prices yaitu inflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM.

Banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, akan tetapi penelitian tersebut hanya fokus pada penyebab inflasi dari sisi permintaan, sedikit sekali kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dari sisi penawaran. Penelitian faktor yang mempengaruhi inflasi juga difokuskan pada skala nasional, sedikit peneliti yang memfokuskan pada tingkat regional atau daerah. Sehingga penelitian tentang inflasi di tingkat regional sangat diperlukan. Pergerakan atau persistensi inflasi memiliki karakteristik berbeda pada setiap daerah, sehingga analisis persistensi pada suatu daerah perlu dilakukan, agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dapat membuat kebijakan dalam pengendalian inflasi dan TPID mengetahui tindakan apa yang akan diambil dalam mengatasi pemngendalian inflasi.

Inflasi nasional merupakan rata-rata tertimbang dari inflasi daerah di Indonesia (Fatimah Hidayati, 2013). Maka perlu dilakukan sebuah studi yang mempelajari penyebab inflasi pada sebuah daerah dan pergerakan inflasi pada daerah tersebut agar bisa mempermudah TPID dalam melakukan pengendalian inflasi. Penelitian ini difokuskan pada penelitian

persistensi inflasi dan penyebab dari inflasi tersebut di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pemilihan daerah DIY ini dikarenakan pola inflasi di DIY pada tahun 2008 sampai tahun 2012 cenderung lebih tinggi dari pola inflasi nasional, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti persistensi inflasi di DIY. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 1.2**  
Tabel Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dengan Inflasi Nasional

Tahun	Inflasi Kota Yogyakarta	Inflasi Nasional
2008	9,88	11,06
2009	2,93	2,78
2010	7,38	6,96
2011	3,88	3,79
2012	4,31	4,30
2013	7,32	8,38

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DIY

Dari tabel diatas dapat dilihat walaupun pada tahun 2008 inflasi Kota Yogyakarta lebih rendah dengan inflasi nasional dengan selisih sebesar 1,18 persen. Akan tetapi pada tahun – tahun berikutnya selisih inflasi kota Yogyakarta dengan inflasi nasional memang tidak terlalu besar, akan tetapi inflasi kota Yogyakarta berada di atas inflasi nasional. Pada tahun 2013 inflasi di kota Yogyakarta lebih rendah dari inflasi nasional. Sehingga dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya inflasi kota Yogyakarta cenderung diatas inflasi nasional. Pada tahun 2013 inflasi

maupun inflasi nasional hal ini di sebabkan karena adanya kenaikan harga barang impor yang disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah, serta adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Anwar Nasution: 2013).

Salah satu penyebab inflasi kota Yogyakarta lebih tinggi dari inflasi nasional pada tahun 2012 adalah karena adanya kenaikan harga makanan pokok dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menurut Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, Haryono, mengatakan penyebab utama inflasi adalah kenaikan harga daging ayam. Komoditas harga daging ayam ras naik 8,93 persen dengan andil positif 0,11 persen. Kemudian harga gula pasir juga naik 7,01 persen memberi andil 0,09 persen ([m.tempo.co/read/news/2012](http://m.tempo.co/read/news/2012)).

Selain tingkat inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang cenderung diatas tingkat inflasi nasional, hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti persistensi inflasi di DIY yaitu dikarenakan harga-harga makanan pokok yang terus meningkat walaupun harga BBM mulai menurun. Turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 tidak langsung berdampak pad turunnya harga kebutuhan masyarakat. Faktor tersebut, menurut sejumlah pedagang disebabkan oleh faktor stabil tingginya permintaan. Selain itu, kendala cuaca yang musim huiian yang dinilai juga mempengaruhi pasokan. Di pasar tradisional

Kranggan Jogja, harga beras masih stabil tinggi diangka Rp 9.500 – Rp 10.000 per kg. Selain harga beras, harga daging ayam broiler juga stabil tinggi antara Rp31.000 hingga Rp32.000 per kilo sementara harga ayam kampung berkisar Rp65.000 per kg. Adapun harga telur juga tetap tinggi dikisaran Rp21.500 hingga Rp22.000 pe kg. Tinggi harga komoditas tersebut, salah satunya disebabkan kenaikan harga pakan ayam (Harianjogja.com).

Dengan adanya isu-isu diatas maka diperlukan penelitian untuk mengetahui persistensi inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena bila harga-harga makanan pokok terus naik, masyarkat miskin akan semakin miskin dan masyarakat menengah juga akan mengalami kemiskinan.

Beberapa penilitian telah dilakukan untuk melihat persistensi inflasi di Indonesia dan beberapa daerah di Indonesia. Dari penelitian sebelumnya oleh Fatimah Hidayati (2103) tentang analisis persistensi infalsi di Jawa Timur menyebutkan bahwasannya derajat persistensi inflasi di Jawa Timur masih tinggi. Sumber utama penyebab munculnya persistensi inflasi terkait shocks yang terjadi pada komponen administered price yang diwakili oleh kelompok volatile foods yang diwakili oleh kelompok bahan makanan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh kelompok pengeluaran untuk kembali ke nilai alamiahnya selama 8 hingga 16 bulan. Sedangkan untuk adanya

pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah memberikan pengaruh yang baik bagi persistensi inflasi di Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Trinil Arimurti dan Budi Trisnanto (2011), tentang persistensi inflasi di Jakarta dan implikasinya terhadap kebijakan pengendalian infasi daerah, menyimpulkan bahwasannya inflasi IHK Jakarta memiliki derajat persistensi inflasi yang tinggi. Penyebab tingginya derajat persistensi inflasi di Jakarta antara lain diakibatkan oleh tingginya derajat persistensi inflasi kelompok volatile food dan kelompok administered price. Waktu yang dibutuhkan komoditi untuk kembali ke rata-ratanya sebelum terjadinya shock yaitu antara 5-12 bulan.

Berdasarkan pembahasan diatas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti persistensi inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dapat membantu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY dalam membuat kebijakan untuk menangani inflasi yang ada DIY. Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis mengambil judul **“ANALISIS PERSISTENSI INFLASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2000 – 2014)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Inflasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan inflasi Kota

2. Persistensi inflasi merupakan kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ketinggian ekuilibriumnya setelah timbulnya suatu *shock*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Berapa besar tingkat persistensi inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 ?
2. Berapa lama waktu yang diperlukan inflasi untuk kembali ke angka normal?
3. Apa sumber persistensi inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta dari sisi penawaran?

### **D. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat persistensi inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui waktu yang diperlukan inflasi untuk kembali ke angka normal.
3. Untuk mengetahui sumber persistensi inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada sisi penawaran.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah, diharapkan dapat membantu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam membuat kebijakan untuk mengontrol tingkat inflasi.
2. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai tingkat persistensi inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dari persistensi inflasi.
3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai persistensi inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih